



Katalog BPS: 3101021.82

STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Edisi Januari 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Edisi Januari 2018



STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Edisi Januari 2018

No. Publikasi: 82560.1801

Katalog BPS: 3101021.82

Ukuran Buku: 20 x 14 cm

Jumlah Halaman: v + 42 halaman

Naskah:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar



Publikasi Statistik Provinsi Maluku Utara edisi Januari 2018 merupakan publikasi triwulanan berupa booklet yang berisi data dan informasi yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. Publikasi ini diterbitkan sebagai ringkasan terhadap data-data statistik yang telah dipublikasikan oleh BPS Provinsi Maluku Utara, di antaranya yaitu melalui Berita Resmi Statistik.

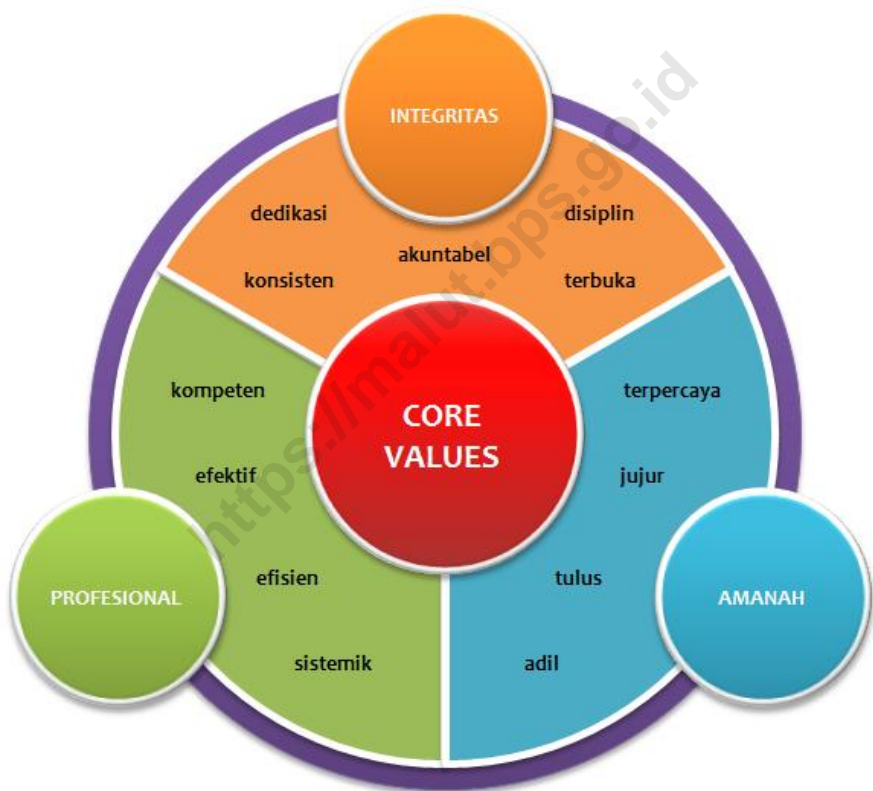
Semoga dengan terbitnya publikasi ini, dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat luas. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini.

Ternate, Februari 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara

Drs. Misfaruddin, M.Si.

NILAI INTI BPS (BPS Core Values)



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Nilai Inti BPS	iv
Daftar Isi	v
Kewilayahan	1
Penduduk	3
Ketenagakerjaan	6
Kemiskinan	10
Gini Ratio	14
Industri Manufaktur	15
Indeks Harga Konsumen Dan Inflasi	18
Ekspor Dan Impor	20
Nilai Tukar Petani	23
Pariwisata	26
Produk Domestik Regional Bruto	29
Indeks Tendensi Konsumen	36
Indeks Pembangunan Manusia	37
Indeks Pembangunan Gender	40
Indeks Demokrasi Indonesia	41

KEWILAYAHAN

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan/UPT Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan/UPT
(1)	(2)	(3)
Halmahera Barat	8	170
Halmahera Tengah	10	63
Kepulauan Sula	12	78
Halmahera Selatan	30	256
Halmahera Utara	17	199
Halmahera Timur	10	104
Pulau Morotai	5	88
Pulau Taliabu	8	71
Ternate	7	77
Tidore Kepulauan	8	90
Maluku Utara	115	1.196

Sumber: Direktori Desa Provinsi Maluku Utara Semester 1 2017

Indikator Kewilayahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

Rincian	Persentase
(1)	(2)
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di tepi laut	78,68
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di dalam hutan	2,09
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di sekitar hutan	48,08
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang tidak memiliki SD/MI	8,70
- Persentase kecamatan yang memiliki Puskesmas/Puskesmas Pembantu	100,00
- Persentase kecamatan yang memiliki pasar dengan bangunan (baik permanen maupun semi permanen)	50,43
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang telah ada keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN	65,64
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang belum memiliki penerangan di jalan utama	62,12
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang hanya menggunakan sarana transportasi air	12,71
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang hanya menggunakan sarana transportasi darat	51,00
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang dapat menggunakan sarana transportasi baik darat maupun air	36,29
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang dapat menggunakan sarana transportasi darat dan memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sepanjang tahun	14,75

Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan (Podes) 2014

Indeks Kesulitan Geografis Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	23,74	48,56	82,75
Halmahera Tengah	26,98	44,81	72,44
Kepulauan Sula	22,01	51,08	81,92
Halmahera Selatan	19,71	61,21	84,79
Halmahera Utara	17,05	47,67	82,04
Halmahera Timur	14,33	48,81	78,43
Pulau Morotai	18,84	52,62	82,69
Pulau Taliabu	32,78	70,17	85,20
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	17,33	44,24	69,70
Maluku Utara	14,33	51,69	85,20

Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan (Podes) 2014

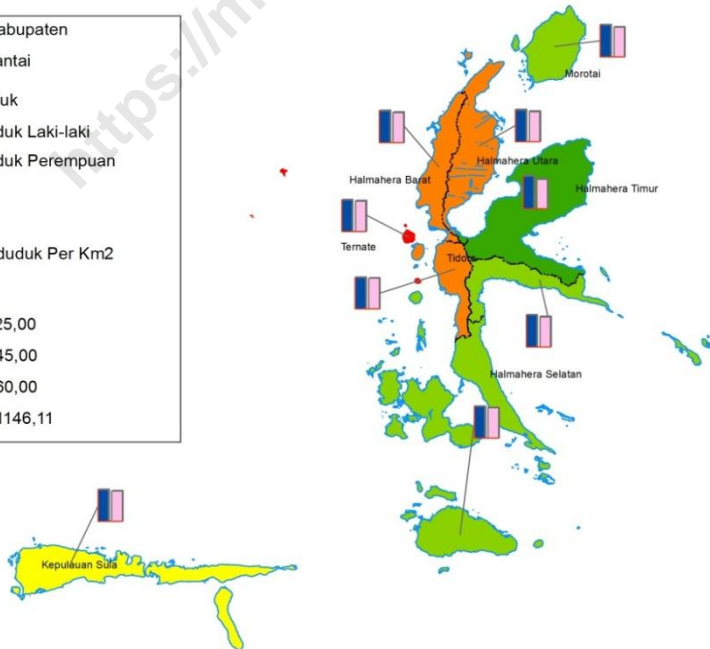
- Beberapa indikator kewilayahan bisa dilihat dari data Pendataan Potensi Desa (Podes).
- Pendataan Podes dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 10 tahun, Podes terakhir yaitu Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014.
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin besar IKG menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi pada wilayah desa tersebut.

PENDUDUK

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	106 791	108 769	110 717	112 722	114 502
Halmahera Tengah	47 079	48 414	49 807	51 315	52 813
Kepulauan Sula	91 406	93 435	95 285	97 177	99 196
Halmahera Selatan	211 682	215 791	219 836	223 460	227 280
Halmahera Utara	173 117	176 573	180 100	183 596	187 104
Halmahera Timur	80 526	82 914	85 188	87 680	90 070
Pulau Morotai	57 565	59 102	60 727	62 412	64 001
Pulau Taliabu	49 510	50 067	50 709	51 316	51 928
Ternate	202 728	207 789	212 997	218 028	223 111
Tidore Kepulauan	94 493	95 813	96 979	98 206	99 337
Maluku Utara	1 114 897	1 138 667	1 162 345	1 185 912	1 209 342

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2010



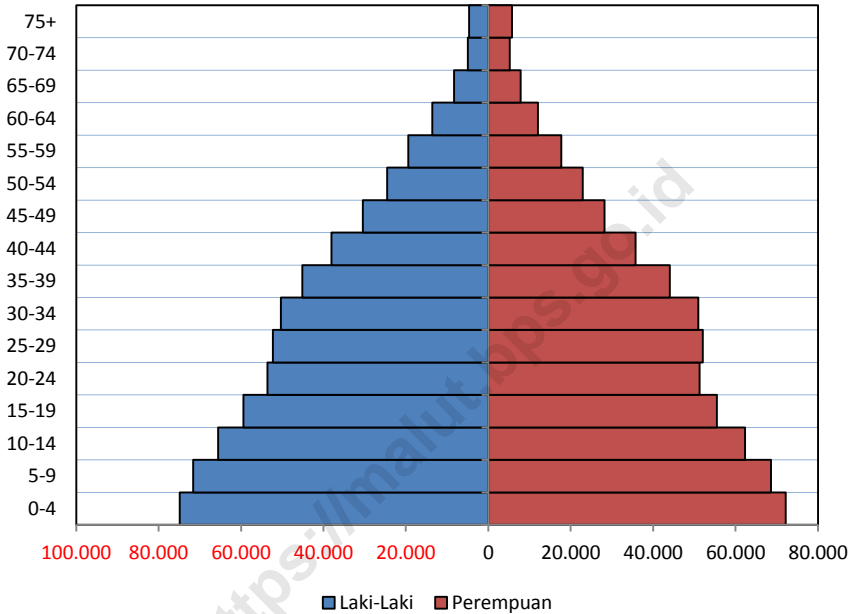
Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	74 889	72 175	147 064
5-9	71 628	68 581	140 209
10-14	65 525	62 281	127 806
15-19	59 438	55 439	114 877
20-24	53 577	51 308	104 885
25-29	52 309	52 079	104 388
30-34	50 296	50 986	101 282
35-39	45 157	44 052	89 209
40-44	38 058	35 717	73 775
45-49	30 481	28 241	58 722
50-54	24 529	22 943	47 472
55-59	19 407	17 735	37 142
60-64	13 569	12 077	25 646
65-69	8 337	7 891	16 228
70-74	5 002	5 198	10 200
75+	4 656	5 781	10 437
Jumlah	616 858	592 484	1 209 342

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2010

- Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.

Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara
Tahun 2017



KETENAGAKERJAAN

Penduduk Provinsi Maluku Utara Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (ribu orang)

Jenis Kegiatan Utama	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	792,4	801,8	811,0
2. Angkatan Kerja	524,5	557,1	516,2
Bekerja	503,4	530,2	488,7
Pengangguran	21,0	26,8	27,5
3. Bukan Angkatan Kerja	267,9	244,7	294,8
Sekolah	83,0	74,0	87,7
Mengurus Rumah Tangga	154,4	144,0	177,9
Lainnya	30,4	26,6	29,1
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,19	69,48	63,65
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,01	4,82	5,33
6. Pekerja tidak penuh	145,66	170,66	157,79
Setengah Penganggur	36,40	56,75	48,40
Paruh Waktu	109,26	113,91	109,38

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (ribu Orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	205,54	234,04	199,03
2. Pertambangan	13,95	15,91	14,44
3. Industri	44,53	36,18	34,06
4. Listrik, Gas dan Air	3,42	0,22	0,86
5. Konstruksi	21,78	31,91	29,79
6. Perdagangan	71,98	78,12	63,90
7. Transportasi	33,08	28,69	29,47
8. Keuangan	4,75	5,09	10,18
9. Jasa Kemasyarakatan	104,46	100,11	106,99
Jumlah	503,48	530,27	488,72

Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (persen)

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	107,34	100,81	112,98
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	97,42	111,94	83,92
Berusaha dibantu buruh tetap	19,93	24,17	14,99
Buruh/karyawan	161,19	156,05	170,95
Pekerja bebas di pertanian	16,10	9,34	17,00
Pekerja bebas di non pertanian	12,60	11,94	16,43
Pekerja keluarga/tak dibayar	88,86	116,02	72,45
Jumlah	503,48	530,27	488,72

Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Perminggu (ribu Orang)

Jumlah Jam Kerja Perminggu	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1 – 7	7,49	7,92	10,90
8 – 14	28,39	28,55	27,12
15 – 24	42,87	45,90	54,54
25 - 34	66,91	88,30	65,23
1 - 34	145,66	170,66	157,79
35 *)	357,82	359,61	330,93
Jumlah	503,48	530,27	488,72

Keterangan : *) termasuk sementara tidak bekerja

Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan (ribu Orang)

Tingkat Pendidikan	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	188,14	235,79	188,52
Sekolah Menengah Pertama	91,21	93,94	86,39
Sekolah Menengah Atas	131,89	107,16	111,66
Sekolah Menengah Kejuruan	23,45	25,90	26,31
Diploma I/II/III	17,57	10,11	14,42
Universitas	51,21	57,36	61,41
Total	503,48	530,27	488,72

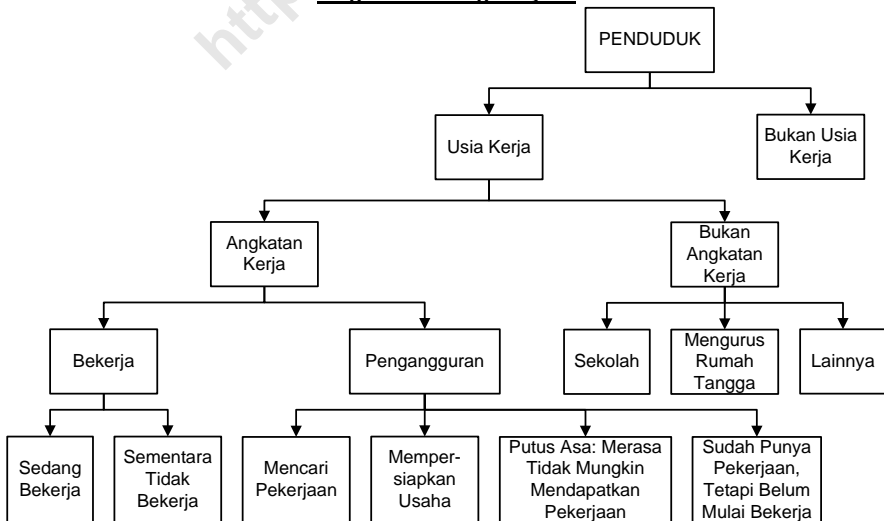
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (Persen)

Tingkat Pendidikan	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	1,79	1,41	2,28
Sekolah Menengah Pertama	0,46	4,78	3,84
Sekolah Menengah Atas	5,75	8,41	9,65
Sekolah Menengah Kejuruan	4,85	9,31	8,15
Diploma I/II/III	7,17	21,58	7,92
Universitas	11,44	5,72	6,35
Total	4,01	4,82	5,33

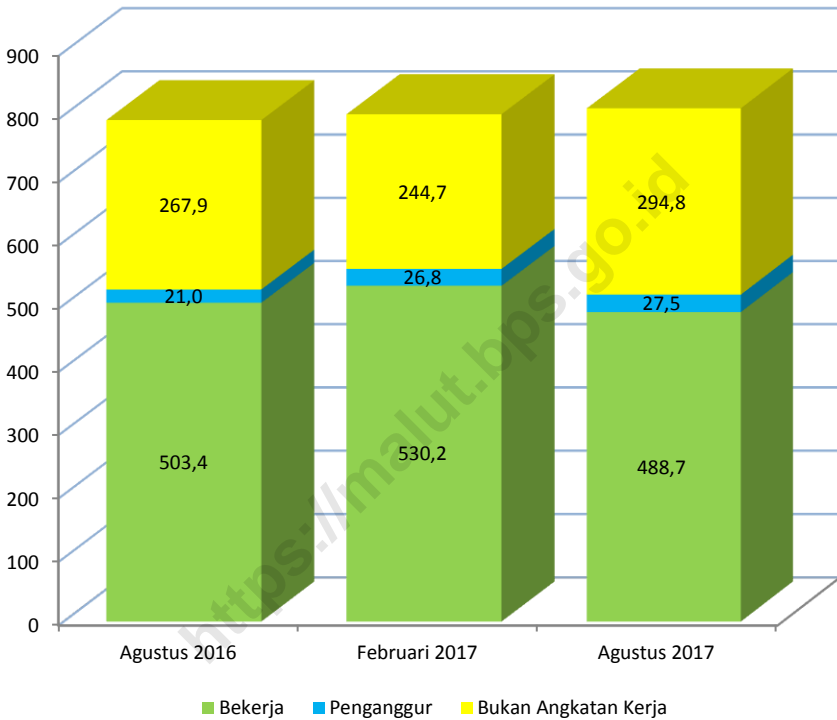
- Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
 - Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
 - Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.
- Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.
- Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
- Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification (ISIC)*.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

Diagram Ketenagakerjaan



**Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama
(ribu orang)**



KEMISKINAN

Jumlah, Komposisi dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sep 2011	8,57	98,74	107,31	2,95	12,61	10,00
Mar 2012	7,57	84,35	91,91	2,55	10,69	8,47
Sep 2012	8,75	79,62	88,36	2,92	9,98	8,05
Mar 2013	9,16	74,04	83,20	2,99	9,22	7,50
Sep 2013	11,02	74,56	85,58	3,56	9,19	7,64
Mar 2014	12,19	70,45	82,64	3,95	8,56	7,30
Sep 2014	11,17	73,62	84,79	3,58	8,85	7,41
Mar 2015	12,25	67,65	79,90	3,85	7,95	6,84
Sep 2015	8,29	64,35	72,65	2,61	7,57	6,22
Mar 2016	10,58	64,10	74,68	3,32	7,44	6,33
Sep 2016	12,45	63,95	76,40	3,76	7,43	6,41
Mar 2017	12,00	64,47	76,47	3,61	7,40	6,35
Sep 2017	12,93	65,35	78,28	3,70	7,55	6,44

Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Periode	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)			Pertumbuhan GK (%)
	K	D	K+D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sep 2011	264 367	226 299	236 590	5,04
Mar 2012	268 729	232 109	242 112	2,33
Sep 2012	276 117	240 447	250 184	3,33
Mar 2013	284 374	248 026	258 060	3,15
Sep 2013	317 176	281 482	291 352	12,90
Mar 2014	321 231	286 242	295 787	1,52
Sep 2014	339 561	307 374	316 160	6,89
Mar 2015	360 933	337 789	344 088	1,52
Sep 2015	378 538	356 325	362 370	6,89
Mar 2016	390 788	371 289	376 554	3,91
Sep 2016	405 368	379 454	386 489	2,64
Mar 2017	410 412	383 784	390 998	1,17
Sep 2017	413.797	390.914	397.340	1,62

Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Periode	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mar 2011	0,149	1,497	1,129	0,010	0,280	0,206
Sep 2011	0,473	2,754	2,137	0,109	0,884	0,674
Mar 2012	0,279	1,824	1,402	0,090	0,459	0,359
Sep 2012	0,078	1,135	0,846	0,003	0,196	0,143
Mar 2013	0,314	0,951	0,775	0,046	0,178	0,141
Sep 2013	0,270	1,127	0,890	0,036	0,210	0,162
Mar 2014	0,439	1,351	1,102	0,073	0,327	0,257
Sep 2014	0,398	1,444	1,159	0,074	0,309	0,245
Mar 2015	0,290	0,858	0,703	0,036	0,160	0,126
Sep 2015	0,611	1,348	1,148	0,143	0,320	0,272
Mar 2016	0,367	0,861	0,728	0,064	0,218	0,177
Sep 2016	0,249	1,176	0,918	0,023	0,275	0,205
Mar 2017	0,667	0,861	0,808	0,246	0,183	0,200
Sep 2017	0,572	0,911	0,814	0,106	0,166	0,149

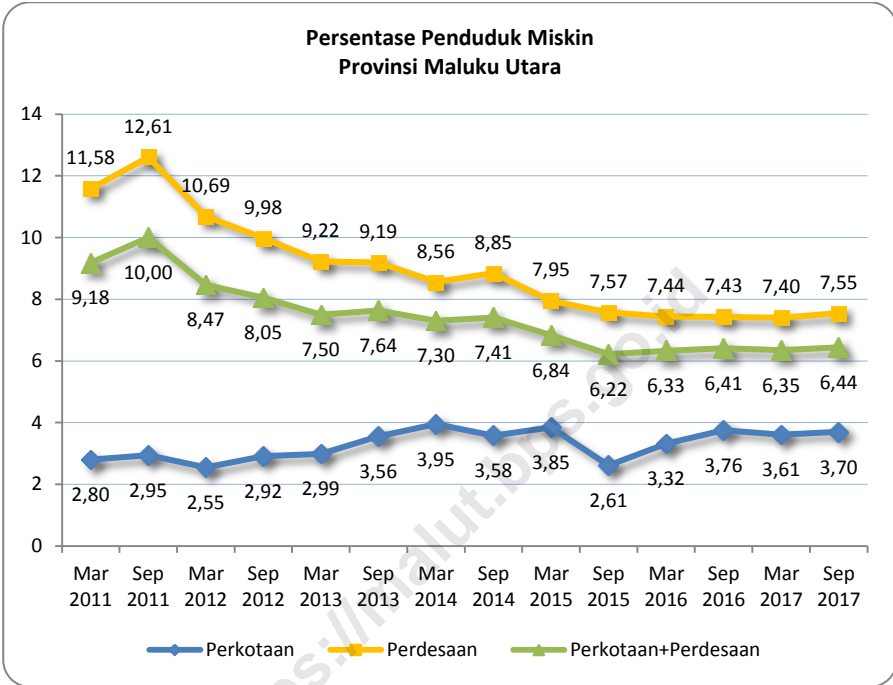
Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

- Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- Sumber data yang digunakan adalah data Modul Konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap triwulan.
- Metode yang digunakan dalam pengukuran kemiskinan di Indonesia adalah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
- Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

- Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.
- *Head Count Index* mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Index* (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
- Indeks Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* (P_2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
- Garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).
- Penghitungan penduduk miskin sampai dengan tahun 2010 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) tahun 2005.
- Penghitungan penduduk miskin tahun 2011 s.d. 2017 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010).



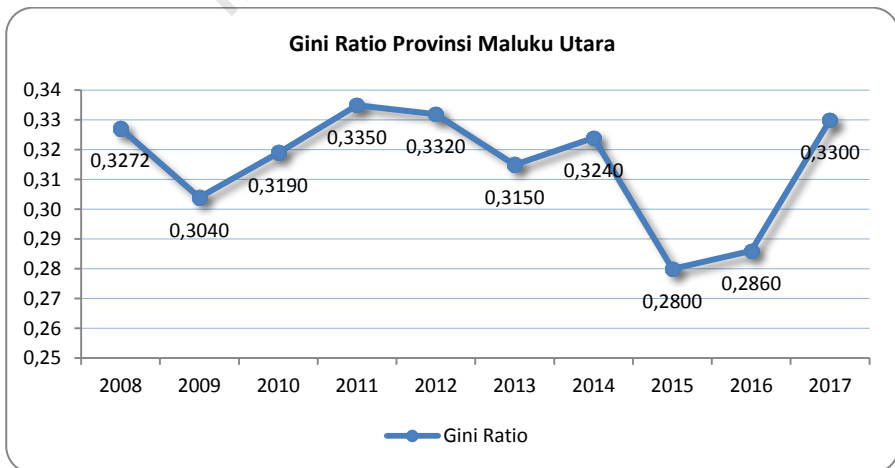
GINI RATIO

Perkembangan Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2010	2011*)	2012*)	2013*)	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	0,311	0,255	0,252	0,223	0,249	0,234	0,258	0,238
Halmahera Tengah	0,261	0,286	0,282	0,257	0,339	0,322	0,265	0,291
Kepulauan Sula	0,326	0,316	0,317	0,267	0,295	0,298	0,262	0,257
Halmahera Selatan	0,285	0,248	0,266	0,274	0,303	0,244	0,209	0,265
Halmahera Utara	0,295	0,283	0,338	0,253	0,312	0,291	0,257	0,235
Halmahera Timur	0,308	0,297	0,261	0,248	0,271	0,264	0,266	0,318
Pulau Morotai	0,308	0,262	0,287	0,315	0,288	0,269	0,241	0,288
Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	0,233	0,273	0,243
Ternate	0,233	0,276	0,289	0,254	0,293	0,245	0,270	0,281
Tidore Kepulauan	0,227	0,251	0,239	0,257	0,222	0,205	0,227	0,227
Maluku Utara	0,319	0,335	0,332	0,315	0,324	0,280	0,286	0,330

*) Hasil Backcasting 2011-2013

- Gini ratio (koefisien gini) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
- Nilai Gini ratio ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini ratio, menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Gini ratio adalah 0 (nol), maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 (satu), berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.
- Penghitungan Gini ratio menggunakan pendekatan data pengeluaran hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).



INDUSTRI MANUFAKTUR

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (persen)

Tahun	Triwulan I 2017		Triwulan II 2017		Triwulan III 2017		Triwulan IV 2017	
	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2012	2,03	-	2,79	-	3,22	-	4,63	-
2013	2,16	13,40	2,54	13,13	2,04	11,83	1,33	8,31
2014	0,93	7,01	2,42	6,88	8,67	13,83	1,37	13,87
2015	4,88	15,53	5,42	21,79	-1,03	10,92	-2,17	7,05
2016	-0,69	1,37	-0,94	-0,80	-2,04	-2,71	0,68	-2,96
2017	-1,73	-3,98	2,73	-0,43	1,74	3,41	2,57	5,35

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil

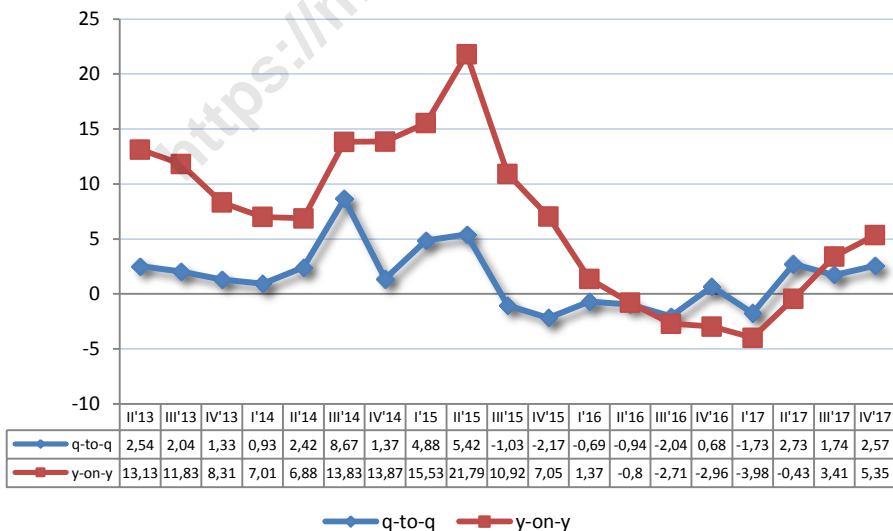
Kode KBLI	Jenis Industri	Triwulan III 2017		Triwulan IV 2017	
		q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y
		(3)	(4)	(5)	(6)
10	Industri Makanan	-0.15	7.19	-1.51	11.43
11	Industri Minuman	-1.16	-12.12	-24.69	-31.79
14	Industri Pakaian Jadi	-	-	-32.46	0.54
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	27.18	40.37	6.42	34.75
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	-0.02	-14.36	15.25	-1.32
24	Industri Logam Dasar	13.05	9.65	23.33	-
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-22.13	-17.26	-0.67	-39.93
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	39.91	78.34	-	-
31	Industri Furnitur	-0.86	33.99	19.04	48.49
32	Industri Lainnya	-	-	66,67	-
	IMK (Industri Mikro dan Kecil)	13.38	28.88	5.83	25.83

- Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).
- Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak

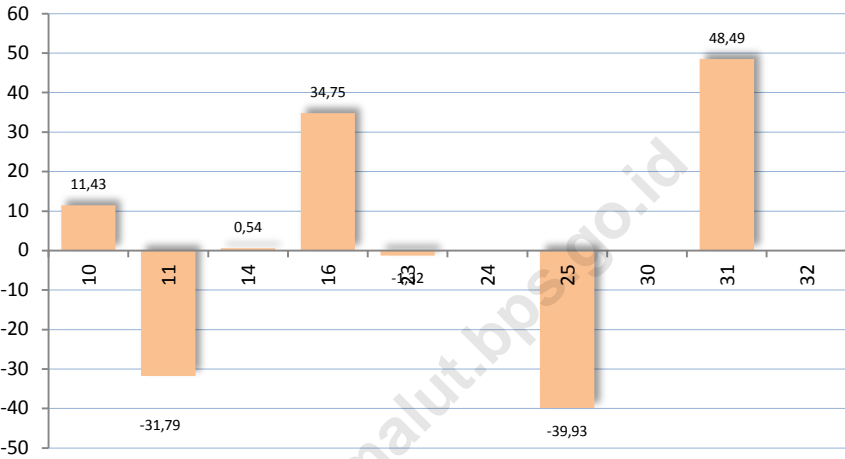
pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

- Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu: Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih); Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang); Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang); Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang).
- Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.
- Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4 , yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009.

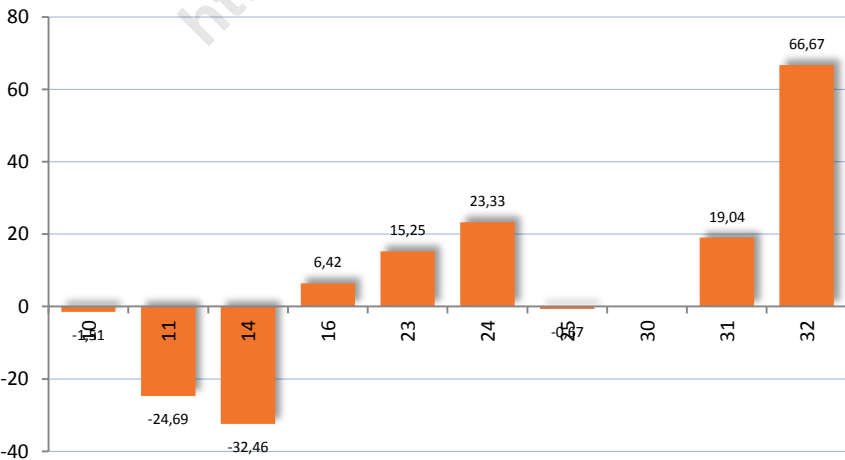
Perkembangan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (persen)



**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil
Triwulanan (y-on-y), Triwulan IV Tahun 2017, Menurut Jenis KBLI**



**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil
Triwulanan (q-to-q), Triwulan IV Tahun 2017, Menurut Jenis KBLI**



INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi (%) Kota Ternate dan Nasional

Bulan	Ternate				Nasional			
	IHK	Inflasi Bulanan	Inflasi Tahun Kalender	Year on Year	IHK	Inflasi Bulanan	Inflasi Tahun Kalender	Year on Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jun '16	128,46	0,30	0,49	3,87	124,29	0,66	1,06	3,45
Jul '16	129,79	1,04	1,53	4,02	125,15	0,69	1,76	3,21
Ags '16	129,66	-0,1	1,43	2,31	125,13	-0,02	1,74	2,79
Sep '16	129,78	0,09	1,53	4,05	125,41	0,23	1,97	3,08
Okt '16	129,51	-0,21	1,31	2,89	125,59	0,14	2,11	3,31
Nov '16	129,85	0,26	1,58	3,14	126,18	0,47	2,59	3,58
Des '16	130,27	0,32	1,91	1,91	126,71	0,42	3,02	3,02
Jan '17	131,09	0,63	0,63	2,02	127,94	0,97	0,97	4,53
Peb '17	131,13	0,03	0,66	3,02	128,24	0,24	1,21	3,83
Mar '17	130,72	0,31	0,35	2,41	128,22	0,01	1,19	3,82
Apr '17	131,19	0,36	0,71	2,72	128,33	0,09	1,28	4,17
Mei '17	131,45	0,20	0,91	2,63	128,83	0,40	1,68	4,33
Jun '17	133,49	1,55	2,47	3,92	129,72	0,69	2,38	4,37
Jul '17	134,56	0,80	3,29	3,68	130,00	0,22	2,60	3,88
Ags '17	132,53	-1,51	1,73	2,21	129,91	-0,07	2,53	3,83
Sep '17	131,86	-0,51	1,22	1,60	130,08	0,13	2,66	3,72
Okt '17	132,55	0,52	1,75	2,35	130,09	0,01	2,67	3,58
Nov '17	131,15	-1,06	0,68	1,00	130,34	0,20	2,87	3,30
Des '17	132,84	1,29	1,97	1,97	131,28	0,71	3,61	3,61
Jan '18	133,71	0,65	0,65	2,00	132,09	0,62	0,62	3,24

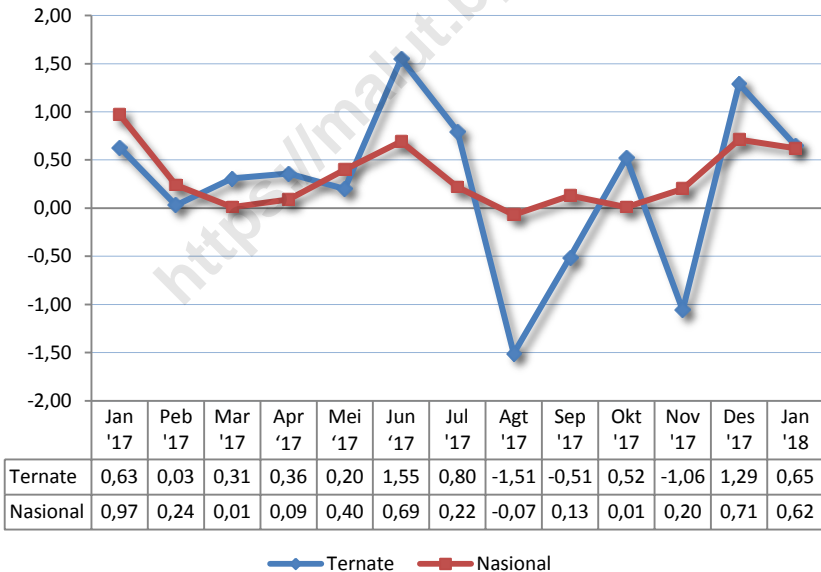
- Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.
- Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.
- Inflasi Tahun Kalender adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.
- *Year on year* adalah inflasi selama setahun dengan membandingkan IHK bulan tertentu pada tahun ke-n dengan IHK bulan yang sama pada tahun ke-(n-1).

- Cara menghitung inflasi bulan ke-n yaitu:

$$\left[\left(\frac{\text{IHK}(n)}{\text{IHK}(n-1)} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

- Mulai Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012 = 100, dimana terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012 = 100) dibandingkan IHK lama (2007 = 100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang.
- Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.
- Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

Inflasi Bulanan Kota Ternate dan Nasional



EKSPOR DAN IMPOR

Perkembangan Berat Bersih dan Nilai Ekspor Provinsi Maluku Utara

Bulan	Berat Bersih(kg)	Nilai(US \$)
(1)	(2)	(3)
Des '16	8 023 920	8 001 854
Jan '17	9 713 340	12 256 157
Peb '17	-	-
Mar '17	18 153 780	19 238 727
Apr '17	71 928 024	21 413 643
Mei '17	188 053 190	19 205 862
Jun '17	71 148 140	12 746 868
Jul '17	182 621 220	22 532 792
Ags '17	292 553 400	21 655 468
Sep '17	311 418 990	40 008 168
Okt '17	348 952 000	12 349 126
Nov '17	345 530 560	39 053 337
Des '17	646 738 120	51 629 617

Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Maluku Utara Menurut Jenis Komoditi (US \$)

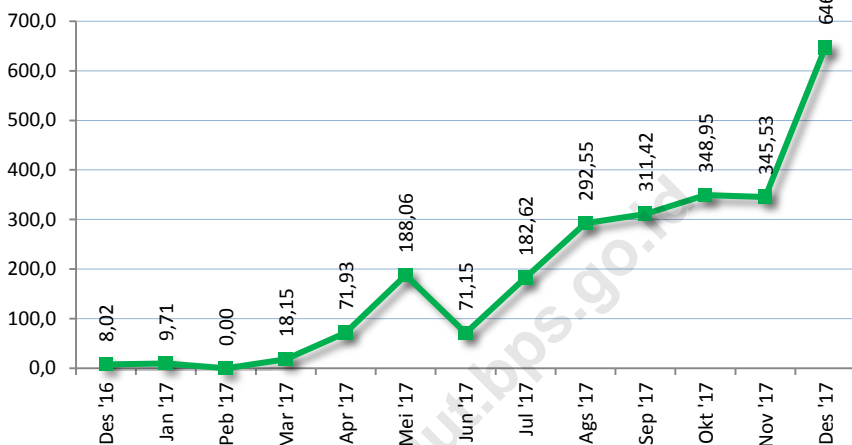
Bulan	Ferro-nickel	Other tube, pipes & hollow profile, seamless, unfinished drill pipe (green pipe)			Alloy pig iron; spiegeleisen	Jumlah
		Nickel ores & concentrates				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Des '16	8 001 854	-	-	-	8 001 854	
Jan '17	12 247 059	9 098	-	-	12 256 157	
Peb '17	-	-	-	-	-	
Mar '17	19 238 727	-	-	-	19 238 727	
Apr '17	19 849 843	-	1 563 800	-	21 413 643	
Mei '17	14 066 842	-	5 139 020	-	19 205 862	
Jun '17	11 354 218	-	1 392 650	-	12 746 868	
Jul '17	17 822 016	-	4 710 776	-	22 532 792	
Ags '17	13 370 018	-	8 285 450	-	21 655 468	
Sep '17	29 583 253	125 275	10 299 640	-	40.008.168	
Okt '17	-	-	12 349 126	-	12 349 126	
Nov '17	25 800 850	-	13 252 487	-	39 053 337	
Des '17	31 694 306	-	19 935 311	-	51 629 617	

Perkembangan Berat Bersih dan Nilai Impor Provinsi Maluku Utara

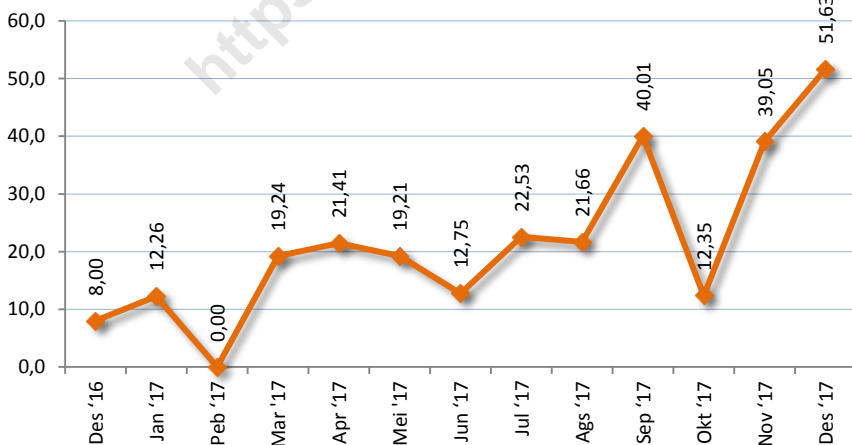
Bulan	Berat Bersih(kg)	Nilai(US \$)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Des '16	24.505.424	21.536.896
Jan '17	14 132 841	7 636 919
Peb '17	2 112 566	1 747 199
Mar '17	2 183 194	2 228 921
Apr '17	56 500 210	5 607 893
Mei '17	14 567 364	9 207 744
Jun '17	38 700 375	10 031 402
Jul '17	38 700 375	1 577 311
Ags '17	33 663 707	35 748 831
Sep '17	76 389 888	17 525 337
Okt '17	19 514 515	11 358 425
Nov '17	11 674 161	20 155 394
Des '17	42 432 153	27 011 101

- Ekspor meliputi seluruh barang yang keluar dari wilayah Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial seperti bantuan kredit lunak, hadiah dan sebagainya.
- Ekspor kapal laut dan pesawat udara termasuk dalam statistik ekspor sedangkan ekspor bunker oil untuk kapal tidak tercatat.
- Data ekspor dikumpulkan berdasarkan dokumen ekspor/pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang diisi oleh eksportir dan telah diberikan ijin muat oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, dan selanjutnya dikirim ke BPS.
- Impor meliputi seluruh barang-barang yang masuk ke wilayah kepabeanaan Indonesia.
- Data impor dikumpulkan berdasarkan dokumen impor/Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diisi oleh importir.

**Perkembangan Volume Ekspor Maluku Utara
(ribu ton)**



**Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Maluku Utara
(juta US\$)**



NILAI TUKAR PETANI

Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara

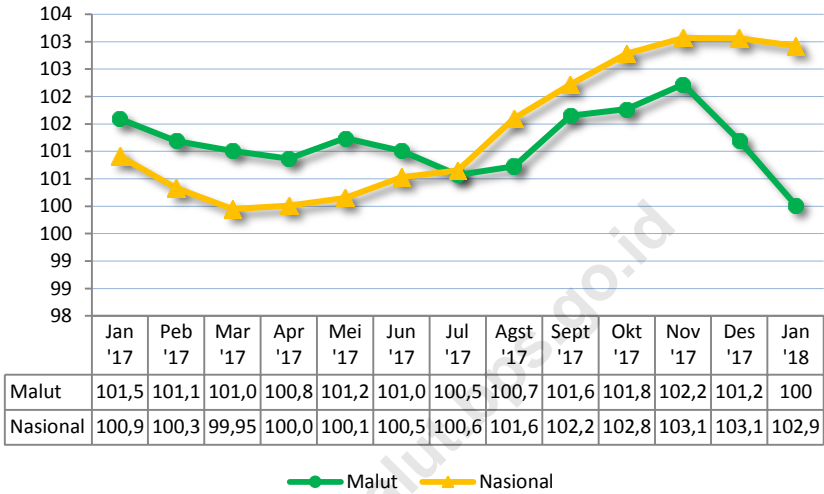
Bulan	NTP Per Sub Sektor					NTP Malut	NTP Nasional
	Tanaman Pangan	Horti- kultura	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jan 2017	108,27	107,64	92,37	107,86	103,55	101,59	100,91
Peb 2017	106,69	107,48	92,51	106,89	104,11	101,19	100,33
Mar 2017	106,83	106,85	92,46	106,47	104,04	101,01	99,95
Apr 2017	106,61	106,76	92,19	107,15	103,27	100,87	100,01
Mei 2017	106,01	106,91	93,37	106,69	104,11	101,24	100,15
Juni 2017	103,75	107,81	93,45	106,68	104,76	101,01	100,53
Jul 2017	101,86	107,79	93,80	105,80	103,98	100,57	100,65
Agst 2017	101,48	107,79	94,07	107,57	102,47	100,73	101,60
Sep 2017	100,40	109,47	95,96	107,81	103,03	101,65	102,22
Okt 2017	101,29	108,84	96,45	107,31	102,12	101,77	102,78
Nov 2017	102,11	109,09	96,81	107,43	103,27	102,22	103,07
Des 2017	101,21	109,01	94,56	107,41	104,13	101,20	103,06
Jan 2018	101,60	107,02	92,38	107,63	103,74	100,02	102,92

Perkembangan Inflasi Perdesaan Maluku Utara dan Nasional

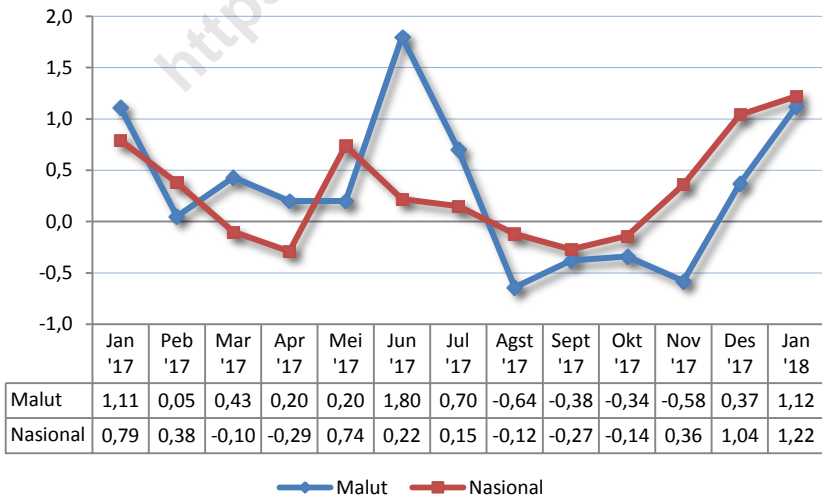
Bulan	Inflasi Perdesaan Maluku Utara	Inflasi Perdesaan Nasional
(1)	(2)	(3)
Jan 2017	1,11	0,79
Peb 2017	0,05	0,38
Mar 2017	0,43	-0,10
Apr 2017	0,20	-0,29
Mei 2017	0,20	0,74
Juni 2017	1,80	0,22
Jul 2017	0,70	0,15
Agst 2017	-0,64	-0,12
Sep 2017	-0,38	-0,27
Okt 2017	-0,34	-0,14
Nov 2017	-0,58	0,36
Des 2017	0,37	1,04
Jan 2018	1,12	1,22

- Nilai Tukar Petani (NTP) adalah angka perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.
- Mulai Desember 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga pertanian diperdesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP, agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya.
- NTP terdiri dari 5 (lima) sub-sektor, yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR), Peternakan dan Perikanan.
- Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani.
- Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumahtangga petani, baik kebutuhan konsumsi rumahtangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.
- Nilai tukar petani (NTP) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani.
- Cara penghitungan NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dikalikan seratus.
- Indeks Konsumsi Rumah tangga (IKRT) merupakan bagian dari indeks yang dibayar oleh petani untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga.
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) meliputi sub kelompok antara lain: bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan rekreasi & olah raga serta transportasi dan komunikasi.
- Perubahan nilai Indeks Konsumsi Rumah Tangga lebih dikenal sebagai Inflasi Perdesaan.

Perkembangan Nilai Tukar Petani



Perkembangan Inflasi Perdesaan



PARIWISATA

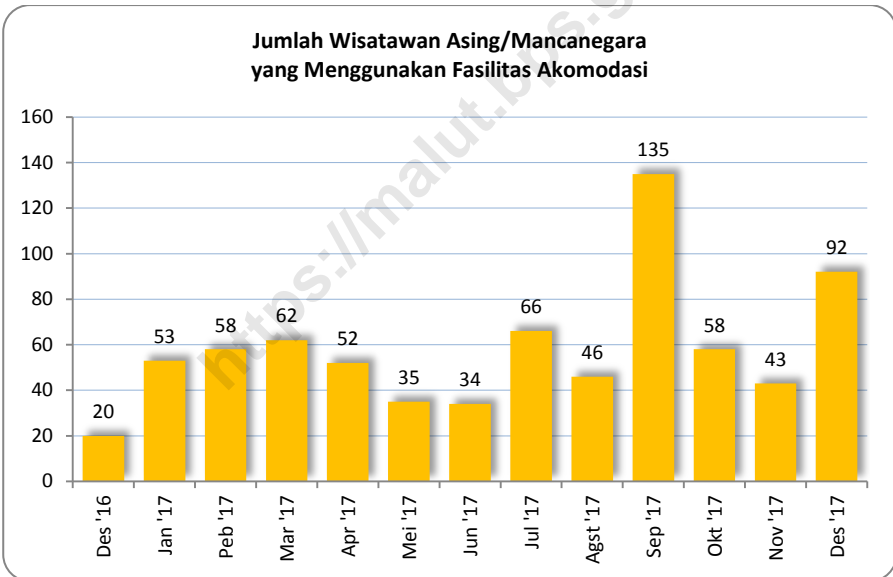
Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Fasilitas Akomodasi Provinsi Maluku Utara

Bulan	Wisatawan Asing/Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Des '16	20	15 576	15 596
Jan '17	53	12 275	12 328
Peb '17	58	13 277	13 335
Mar '17	62	15 983	16 045
Apr '17	52	15 865	15 917
Mei '17	35	15 372	15 407
Jun '17	34	13 691	13 725
Jul '17	66	17 628	17 694
Agst '17	46	17 371	17 417
Sep '17	135	16 679	16 814
Okt '17	58	17 897	17 955
Nov '17	43	18 358	18 401
Des '17	92	19 433	19 525

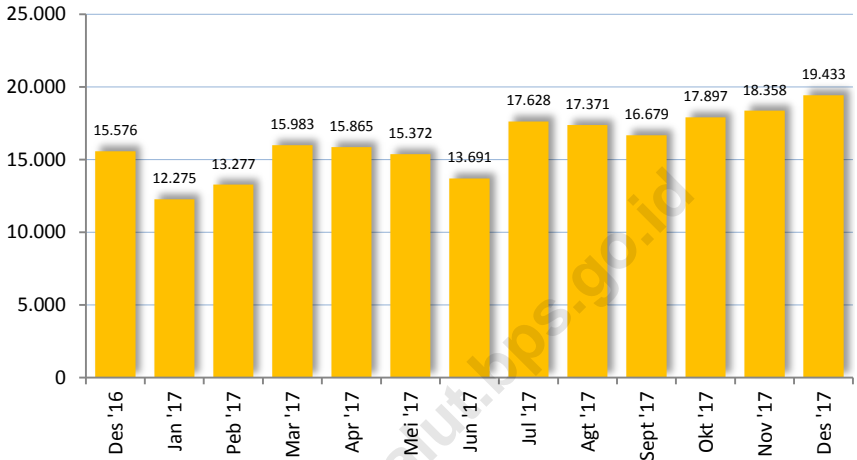
Tingkat Penghunian Kamar Provinsi Maluku Utara

Bulan	Malam Kamar Tersedia	Malam Kamar Terjual	TPK
(1)	(2)	(3)	(4)
Des '16	51 739	19 023	36,76
Jan '17	57 784	17 555	30,38
Peb '17	56 702	18 193	32,09
Mar '17	60 574	20 345	33,59
Apr '17	60 240	19 581	32,50
Mei '17	62 775	20 177	32,14
Jun '17	60 780	17 649	29,04
Jul '17	63 395	19 178	30,25
Agst '17	62 769	19 835	31,60
Sep '17	60 750	20 388	33,56
Okt '17	62 961	20 846	33,11
Nov '17	60 990	21 879	35,87
Des '17	63 643	17 610	27,67

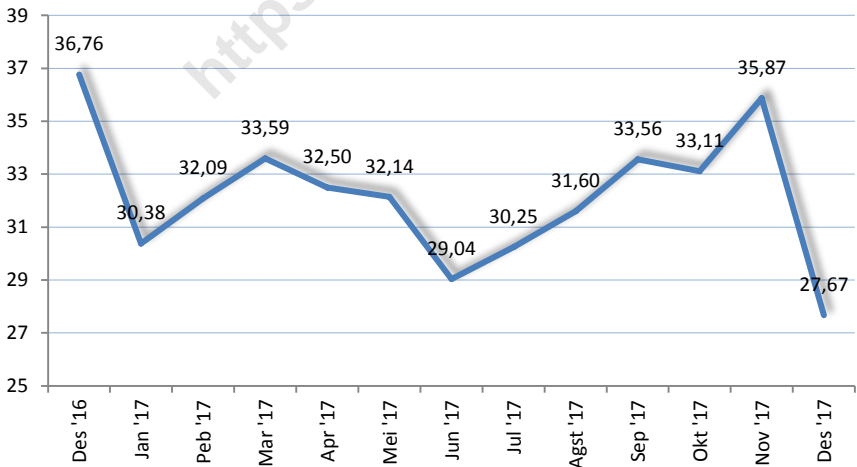
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel adalah banyaknya malam kamar yang dihuni dibagi dengan banyaknya malam kamar yang tersedia dikali 100 persen.
- Tingkat Pemakaian Tempat Tidur adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya malam tempat tidur yang tersedia dikali 100 persen.
- Rata-rata Lamanya Tamu Menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dengan banyaknya tamu yang datang menginap di akomodasi.
- Rata-rata Tamu Per Kamar (GPR) adalah perbandingan antara banyaknya malam tamu atau malam tempat tidur dengan banyaknya malam kamar yang dihuni.
- Keterangan:
 - 1 malam kamar = 1 kamar x 1 malam
 - 1 malam tempat tidur = 1 tempat tidur x 1 malam
 - 1 malam tamu = 1 tamu x 1 malam



Jumlah Wisatawan Nusantara yang Menggunakan Fasilitas Akomodasi



Tingkat Penghunian Kamar



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)

Kategori	Uraian	Triwulan			
		I 2017	II 2017	III 2017	IV 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 889,2	1 928,2	1 965,0	1 945,9
B	Pertambangan dan Penggalian	693,4	714,8	771,5	783,5
C	Industri Pengolahan	429,1	470,3	583,8	592,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,5	8,3	8,2	8,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,2	6,4	6,5	6,6
F	Konstruksi	504,8	516,4	534,8	581,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 352,1	1 400,9	1 435,4	1 432,1
H	Transportasi dan Pergudangan	481,7	500,9	515,2	521,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,3	36,4	37,7	38,8
J	Informasi dan Komunikasi	282,1	291,4	300,7	305,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	241,2	247,6	252,0	270,3
L	Real Estate	8,9	9,2	9,4	9,6
M,N	Jasa Perusahaan	24,4	25,3	26,2	26,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 192,9	1 258,1	1 279,9	1 372,0
P	Jasa Pendidikan	280,7	285,4	300,5	311,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	157,5	162,4	167,2	175,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	58,8	61,2	63,5	64,0
PDRB		7 646,7	7 923,1	8 257,4	8 445,3

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)

Kate- gori	Uraian	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 270,3	1 280,6	1 284,4	1 265,1
B	Pertambangan dan Penggalian	545,8	551,9	573,2	579,7
C	Industri Pengolahan	344,2	378,1	472,2	470,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,9	6,4	6,3	6,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,1	5,3	5,3	5,4
F	Konstruksi	371,8	377,9	388,6	416,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 012,0	1 039,3	1 057,5	1 060,7
H	Transportasi dan Pergudangan	325,6	334,4	343,2	346,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,6	26,5	27,4	28,2
J	Informasi dan Komunikasi	248,0	254,0	261,3	265,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	170,4	174,3	175,9	186,3
L	Real Estate	6,8	7,0	7,1	7,2
M,N	Jasa Perusahaan	18,9	19,5	20,0	20,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	864,2	897,4	907,5	976,8
P	Jasa Pendidikan	190,2	192,6	199,7	205,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118,5	121,7	125,1	130,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	46,3	47,8	49,5	49,9
PDRB		5 570,6	5 714,6	5 904,3	6 021,5

Laju Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persentase)

Kategori	Uraian	Triw III-2017	Triw IV-2017	Triw III-2017	Triw IV-2017	Laju	Sumber
		terhadap	terhadap Triw	terhadap	terhadap	Pertumbuhan	Pertumbuhan
(1)	(2)	Triw II-2017	III-2017	Triw III-2016	Triw IV-2016	2017	2017
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,29	-1,50	1,41	1,02	3,16	0,73
B	Pertambangan dan Penggalian	3,86	1,13	10,28	9,28	11,22	1,05
C	Industri Pengolahan	24,91	-0,31	41,50	47,11	32,13	1,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,38	2,83	9,80	11,38	7,42	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,93	1,09	8,47	7,40	7,11	0,01
F	Konstruksi	2,85	7,26	8,78	10,28	8,24	0,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,75	0,30	5,37	6,37	6,46	1,17
H	Transportasi dan Pergudangan	2,64	1,01	6,81	7,42	8,01	0,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,30	2,86	9,97	10,73	9,72	0,04
J	Informasi dan Komunikasi	2,91	1,41	6,30	7,41	6,67	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,92	5,93	5,48	5,97	5,28	0,16
L	Real Estate	1,44	1,66	8,15	8,64	8,19	0,01
M,N	Jasa Perusahaan	2,72	1,07	6,72	7,70	6,64	0,02
O	Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,12	7,64	7,18	6,81	5,57	0,89
P	Jasa Pendidikan	3,70	2,97	4,51	6,35	5,63	0,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,74	4,42	4,90	8,24	6,20	0,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,47	0,80	7,19	7,33	6,14	0,05
	PDRB	3,32	1,98	7,76	8,30	7,67	7,67

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (milyar rupiah)

Komponen	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4 384,85	4 502,40	4 555,28	4 661,99
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	91,37	94,11	95,95	102,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2 196,00	2 657,31	2 723,65	3 425,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 007,90	2 377,88	2 426,42	3 010,38
5. Perubahan Inventori	-10,10	39,87	-367,91	-202,45
6. Ekspor Luar Negeri	476,09	793,88	1 256,84	1 562,31
7. Impor Luar Negeri	186,30	381,85	850,64	893,74
8. Net Ekspor Antar Daerah	-1 313,07	-2 160,48	-1 582,16	-3 220,94
PDRB	7 646,73	7 923,11	8 257,42	8 445,31

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (milyar rupiah)

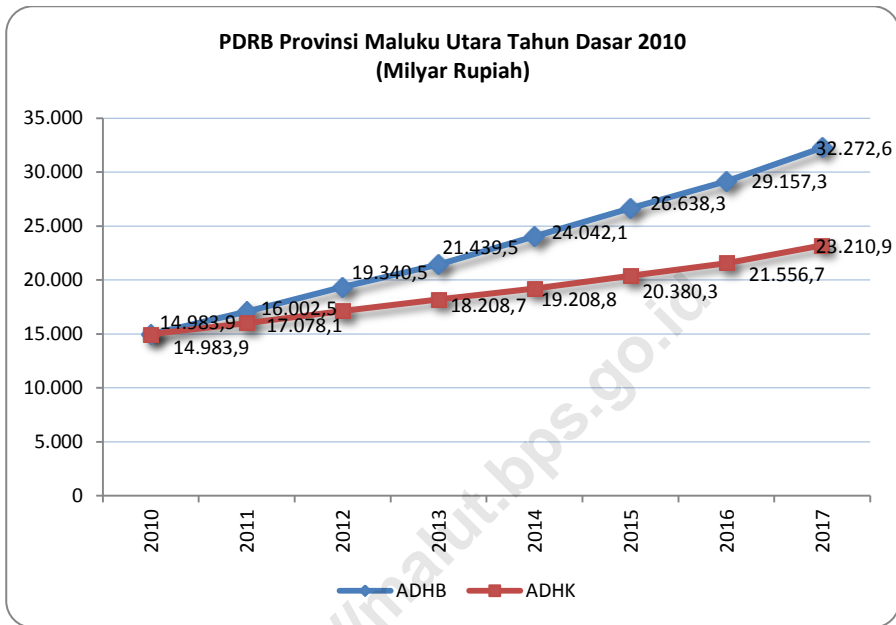
Komponen	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12 449,25	3 172,20	3 236,70	3 251,31
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	261,92	68,12	69,72	70,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6 710,75	1 505,54	1 779,26	1 804,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6 424,41	1 535,66	1 776,93	1 804,74
5. Perubahan Inventori	160,08	-6,17	24,15	-222,26
6. Ekspor Luar Negeri	461,65	508,27	763,56	1 166,64
7. Impor Luar Negeri	2 298,43	147,18	277,49	588,03
8. Net Ekspor Antar Daerah	-2 612,95	-1 065,87	-1 658,24	-1 383,71
PDRB	21 556,68	5 570,57	5 714,58	5 904,26

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Tahun Dasar 2010, rupiah)

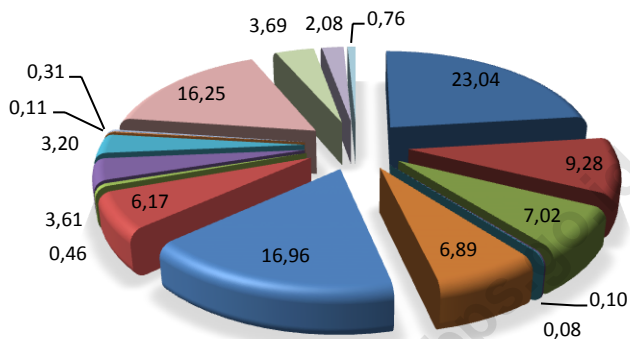
Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	13 579 981	14 757 254	15 842 387
Halmahera Tengah	28 942 846	30 989 558	34 479 189
Kepulauan Sula	17 217 823	18 812 570	20 047 581
Halmahera Selatan	16 812 026	18 199 534	19 529 220
Halmahera Utara	21 108 052	22 893 711	24 246 416
Halmahera Timur	25 468 926	27 251 319	28 803 758
Pulau Morotai	16 362 733	17 794 041	19 257 462
Pulau Taliabu	17 561 548	19 122 379	20 775 118
Ternate	30 134 072	33 238 594	36 128 993
Tidore Kepulauan	19 495 788	21 664 660	23 272 636

Maluku Utara	21 114 230	22 919 861	24 593 079
--------------	------------	------------	------------

- PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu.
- PDRB dihitung berdasarkan:
 1. Atas dasar harga berlaku (ADHB), Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
 2. Atas dasar harga konstan (ADHK), Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun dasar tertentu sebagai dasar.
- Pendekatan yang digunakan dalam penghitungan PDRB ada 3 macam, yaitu:
 1. Pendekatan Produksi, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah dalam jangka waktu tertentu.
 2. Pendekatan Pendapatan, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi (FP) yang digunakan dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
 3. Pendekatan Pengeluaran, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (unit institusi). Pengeluaran yang dimaksud diistilahkan sebagai permintaan akhir.



Struktur PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV Tahun 2017



- A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- B - Pertambangan dan Penggalian
- C - Industri Pengolahan
- D - Pengadaan Listrik dan Gas
- E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- F - Konstruksi
- G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H - Transportasi dan Pergudangan
- I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

INDEKS TENDENSI KONSUMEN

Indeks Tendensi Konsumen Menurut Variabel Pembentuknya

Variabel Pembentuk	Triwulan			
	I-2017	II-2017	III-2017	IV-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan rumah tangga	93,67	123,85	112,89	102,27
Pengaruh inflasi terhadap total pengeluaran rumah tangga	108,51	102,71	103,22	103,35
Volume/frekuensi konsumsi barang/jasa	112,26	110,27	94,35	102,94
Indeks Tendensi Konsumen	101,71	115,17	106,27	102,71

- Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan Badan Pusat Statistik melalui Survei Tendensi Konsumen (STK).
- ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang.
- Responden STK merupakan sub-sampel dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) khusus di daerah perkotaan.
- Pemilihan sampel dilakukan secara panel antar triwulan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perubahan persepsi konsumen antar waktu.
- Nilai ITK Provinsi Maluku Utara pada Triwulan I-2018 diperkirakan sebesar 99,01, artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan sedikit menurun dari triwulan sebelumnya. Angka tersebut menggambarkan tingkat optimisme konsumen diperkirakan lebih rendah dibandingkan Triwulan IV-2017 (nilai ITK sebesar 102,71).

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia dan Peringkat Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	IPM					Peringkat				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Halmahera Barat	60,71	61,47	62,06	62,97	63,83	5	5	5	5	5
Halmahera Tengah	59,94	60,89	61,49	62,07	63,05	6	6	6	6	6
Kepulauan Sula	58,83	59,77	60,18	60,50	61,25	8	8	8	8	8
Halmahera Selatan	59,50	59,92	60,34	61,26	62,17	7	7	7	7	7
Halmahera Utara	62,94	63,81	64,18	65,04	66,02	3	3	3	3	3
Halmahera Timur	61,73	62,71	63,26	63,99	64,92	4	4	4	4	4
Pulau Morotai	57,16	57,97	58,34	59,27	59,87	9	9	9	9	9
Pulau Taliabu	-	56,86	57,31	58,26	58,66	-	10	10	10	10
Ternate	75,81	76,69	77,15	77,64	77,80	1	1	1	1	1
Tidore Kepulauan	65,42	66,25	66,76	67,45	68,37	2	2	2	2	2
Maluku Utara	63,93	64,78	65,18	65,91	66,63	27	27	27	27	27

Keterangan: Peringkat kabupaten/kota berdasarkan jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, sedangkan peringkat provinsi berdasarkan jumlah provinsi di Indonesia

Komponen Pembentuk IPM Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (RP 000)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	65,35	65,45	12,61	13,05	7,77	7,86	6 889	7 076
Halmahera Tengah	62,40	62,60	12,29	12,70	7,85	8,14	7 359	7 481
Kepulauan Sula	62,39	62,50	11,83	12,23	7,95	7,96	6 545	6 741
Halmahera Selatan	65,03	65,11	11,91	12,31	7,15	7,42	6 791	6 894
Halmahera Utara	68,77	68,86	12,69	13,06	8,06	8,35	6 957	7 110
Halmahera Timur	67,49	67,67	12,09	12,48	7,57	7,77	7 41	7 560
Pulau Morotai	65,98	66,13	11,59	11,92	6,84	6,88	5 809	5 888
Pulau Taliabu	61,08	61,20	11,48	11,73	7,41	7,42	6 158	6 208
Ternate	70,07	70,17	15,05	15,06	11,12	11,13	12 529	12 643
Tidore Kepulauan	68,43	68,54	13,27	13,74	8,91	9,11	7 631	7 772
Maluku Utara	67,44	67,51	13,10	13,45	8,37	8,52	7 423	7 545

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).
- IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); 2) Pengetahuan (*knowledge*); dan 3) Standar hidup layak (*decent standard of living*).
- IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.
- Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* - PPP).

- Persamaan IPM dapat ditulis sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

dimana:

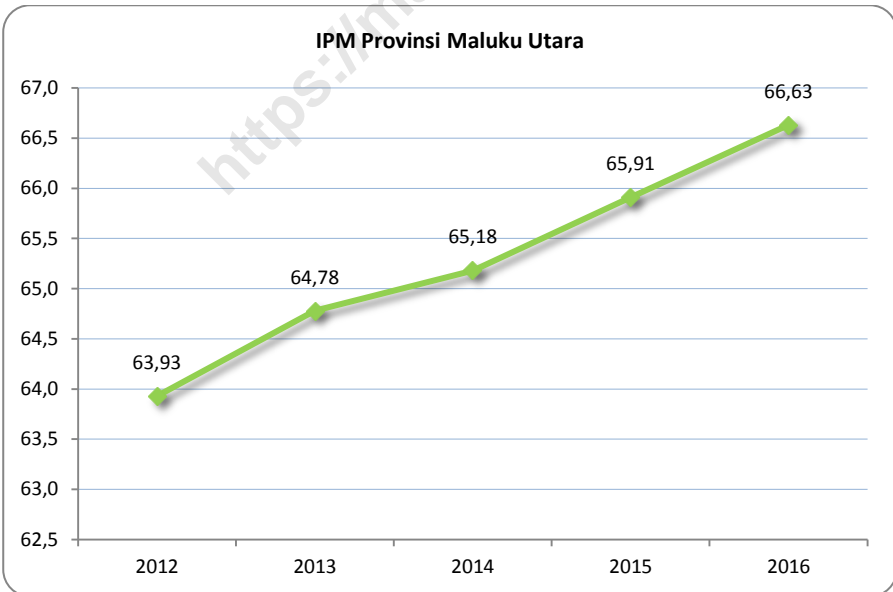
$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara

Tahun	Indeks Pembangunan Gender
(1)	(2)
2010	85,29
2011	85,31
2012	87,06
2013	87,96
2014	88,79
2015	88,86

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender.
- Sebelum menghitung IPG, dihitung terlebih dahulu pencapaian yang disetarakan dengan tingkat pencapaian yang merata (X_{ede}).
- Cara penghitungan IPG:

$$IPG = \frac{X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis}}{3}$$

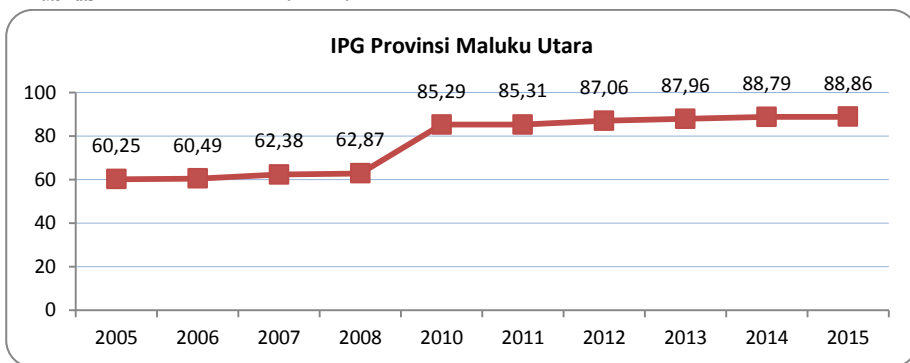
$$X_{ede} = \left(P_f X_f^{(1-\epsilon)} + P_m X_m^{(1-\epsilon)} \right)^{1/(1-\epsilon)}$$

dimana:

$X_{ede(1)} = X_{ede}$ untuk harapan hidup

$X_{ede(2)} = X_{ede}$ untuk pendidikan

$I_{inc-dis}$ = Indeks distribusi pendapatan



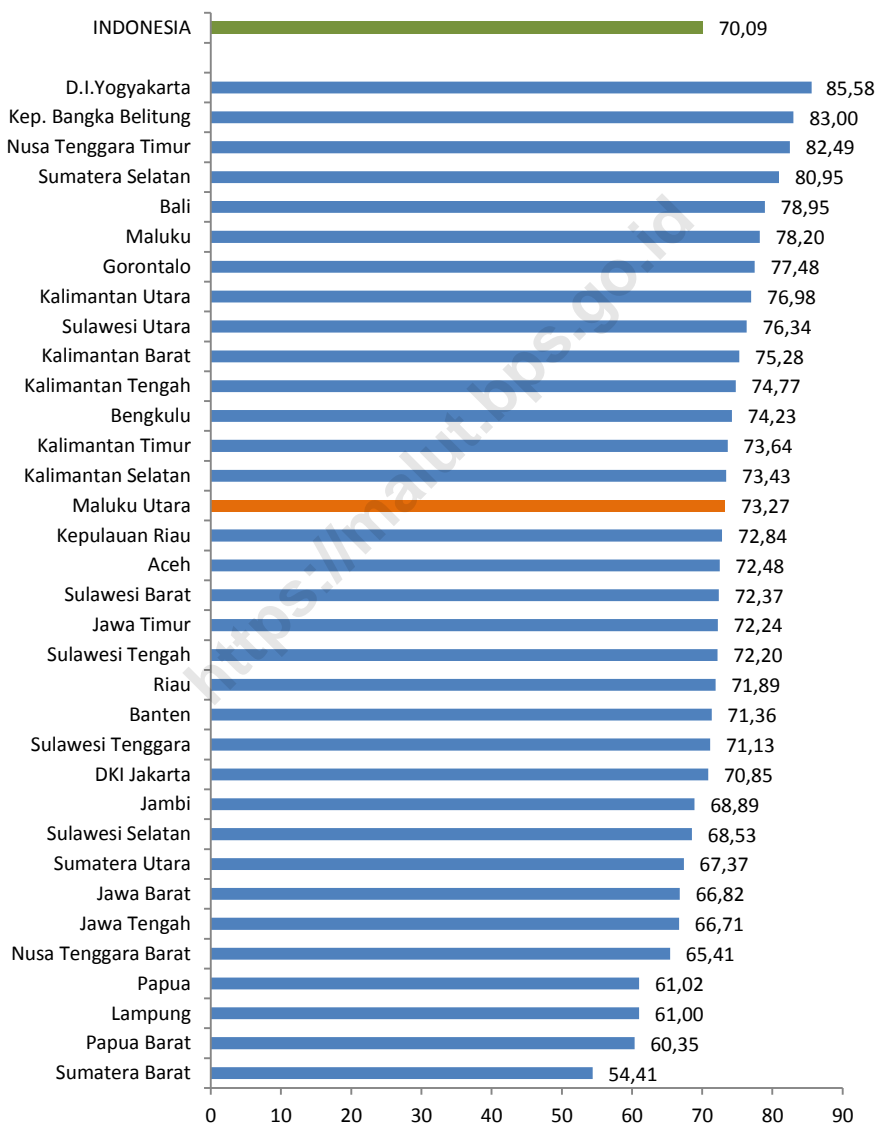
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Aspek dan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Utara

Aspek Demokrasi	Capaian 2011	Capaian 2012	Capaian 2013	Capaian 2014	Capaian 2015	Capaian 2016
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Kebebasan Sipil	90,04	88,15	83,67	76,90	73,53	92,27
II. Hak-Hak Politik	32,61	50,13	48,94	60,61	61,00	61,79
III. Lembaga Demokrasi	62,56	66,55	63,40	68,16	47,25	67,59
Indeks Keseluruhan	59,17	66,83	64,06	67,90	61,52	73,27

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi.
- Aspek demokrasi yang digunakan dalam penyusunan IDI adalah:
 1. Kebebasan sipil (*civil liberties*)
 2. Hak-hak politik (*political rights*)
 3. Lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*)
- Tiga aspek demokrasi tersebut terbagi menjadi 11 variabel yang terbagi lagi menjadi 28 indikator.
- Manfaat IDI yaitu:
 1. Secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.
 2. Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.
 3. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia 2016 Menurut Peringkat



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No 65, Ternate

Telp: (0921) 3127878, Fax: (0921) 3126301

Homepage: <http://malut.bps.go.id>, Email: malut@bps.go.id